

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah sebagai bagian dari system perbankan ganda menghadirkan alternatif jasa keuangan (perbankan) yang semakin lengkap kepada masyarakat. Sistem perbankan syariah yang mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas dan berkeadilan untuk meningkatkan perekonomian bangsa.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 dan berbagai landasan hukum lainnya, maka pengembangan perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang semakin kuat dan akan mampu mendorong pertumbuhannya. Hal ini diharapkan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional akan semakin signifikan. Dengan progress perkembangannya pada tahun 2015 berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan aset perbankan syariah mengalami kenaikan dari tahun 2014. Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari 204.961 (dalam Milyar Rupiah) menjadi 213.423 (dalam Milyar Rupiah) dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan dari 67.383 (dalam Milyar Rupiah) menjadi 82.839 (dalam Milyar Rupiah).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat. (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi ini dapat bernilai positif dan juga negatif.

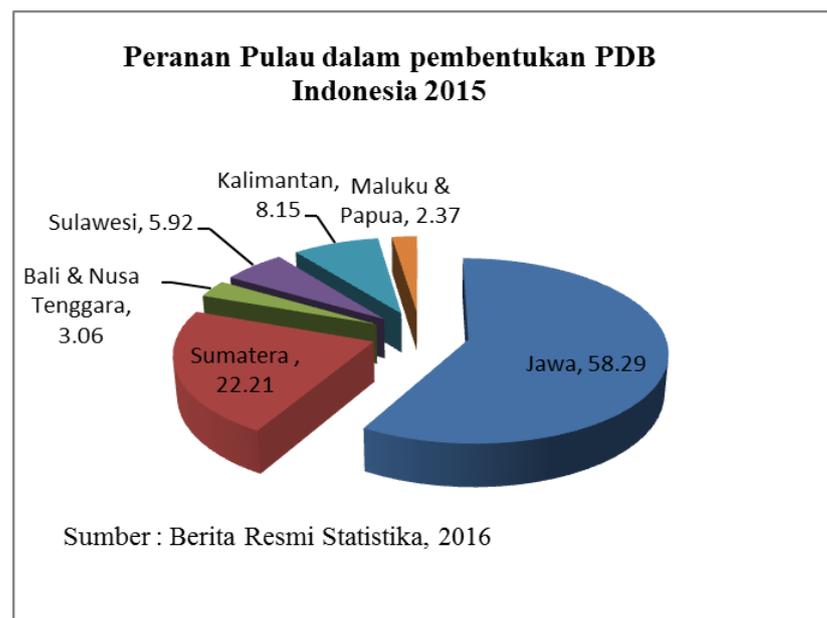
Jika pertumbuhan ekonomi bernilai positif dalam suatu periode, maka kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif dalam suatu periode, maka kegiatan ekonomi pada periode itu mengalami penurunan.

Ekonomi Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistika Indonesia pada Triwulan IV-2015 ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen bila dibandingkan dengan Triwulan IV 2014. Pertumbuhan terjadi di seluruh lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi 7,91 persen. Jasa keuangan dan asuransi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 12,52 persen, diikuti informasi dan komunikasi sebesar 9,74 persen, dan kontraksi 8,24 persen. (Berita Resmi Statistik, 2016)

Hubungan antara pertumbuhan jasa keuangan diartikan sebagai peningkatan volume produk, asset, dan jasa perbankan, serta lembaga-lembaga intermediasi lainnya dan pasar modal dan pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan. Sektor keuangan memegang peranan yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan sebagai intermediasi yang mampu memobilisasi dan pihak ketiga. Sektor keuangan menjadikan dana pihak ketiga sebagai modal yang dapat dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini akan meningkatkan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perbankan syariah dengan karakteristik yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif pilihan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan bank, serta mengedepankan keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Perbankan syariah dengan menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa dengan skema keuangan yang lebih variatif menjadi alternatif system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.



Gambar 1.1
Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB di Indonesia

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2015 masih didominasi oleh kelompok di pulau Jawa dalam memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,29 %, kemudian diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 22,21%, pulau Kalimantan sebesar 8,15 %, pulau Sulawesi sebesar 5,92 %, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,06%, terakhir Maluku dan Papua sebesar 2,37 %. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di pulau Jawa memberikan pengaruh paling besar terhadap PDB di Indonesia.

TABEL 1.1.

Daftar Jumlah DPK, Total Aset, dan Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Provinsi Tahun 2015

No	Provinsi	DPK (Dalam Milyar Rupiah)	Total Aset (Dalam Milyar Rupiah)	Pembiayaan (Dalam Milyar Rupiah)
1	Jawa Barat	26398	39794,17958	28031,34216
2	Banten	6051	8178,311936	5717,689415
3	DKI Jakarta	113360	222699,3932	88980,95768
4	Yogyakarta	3618	4397,626067	2706,750148
5	Jawa Tengah	12421	19352,86724	12908,86541
6	Jawa Timur	19754	28425,81358	20352,02904
7	Bengkulu	583	956,5307165	806,6528232
8	Jambi	1101	2042,336376	1926,53666
9	Nanggroe Aceh Darussalam	4245	5633,234686	2933,687943
10	Sumatera Utara	8371	11219,82965	8180,549921
11	Sumatera Barat	2741	4133,478548	3570,319669
12	Riau	3851	7433,044597	3519,394714
13	Sumatera Selatan	4210	5431,894466	4074,611806
14	Bangka Belitung	223	309,7882179	288,5110938
15	Kepulauan Riau	1387	2699,706129	2535,627499
16	Lampung	1893	2580,811289	2053,460431
17	Kalimantan Selatan	3044	4451,359962	3151,932863
18	Kalimantan Barat	1874	3897,300401	2999,084966

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Data diolah)

Lanjutan Tabel 1.1.

No	Provinsi	DPK (Dalam Milyar Rupiah)	Total Aset (Dalam Milyar Rupiah)	Pembiayaan (Dalam Milyar Rupiah)
19	Kalimantan Timur	4324	5969,932695	4129,727976
20	Kalimantan Tengah	687	873,3142159	744,7233962
21	Sulawesi Tengah	774	1167,228189	936,5855533
22	Sulawesi Selatan	3881	7228,746753	5738,162753
23	Sulawesi Utara	250	471,0335053	443,8398152
24	Gorontalo	215	324,8942077	171,968776
25	Sulawesi barat	174	199,5521363	311,2400062
26	Sulawesi Tenggara	623	948,0876579	812,6466828
27	Nusa Tenggara Barat	1241	2430,934997	1962,325698
28	Bali	802	1642,599654	1511,287752
29	Nusa Tenggara Timur	116	232,0938522	213,682372
30	Maluku	314	436,1936229	96,50183505
31	Papua	601	904,0277704	504,2145706
32	maluku Utara	372	421,3526237	189,3740702
33	Papua Barat	294	342,1390841	149,1394582
34	Luar Indonesia	1381	1611,009117	343,046121
Total		231175,385	398840,6467	212996,4711

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Data diolah)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dana pihak ketiga, total aset, dan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2015 tertinggi dimiliki oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan dana pihak ketiga sebesar 78,55%, total aset sebesar 80,9 %, dan pembiayaan sebesar 74,5%. Hal ini

menunjukkan betapa dominannya perbankan syariah di Pulau Jawa pada tahun 2015.

Gambar 1.1 dan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada saat yang bersamaan baik itu pemberi kontribusi tertinggi terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2015, maupun besarnya dana pihak ketiga, total aset, dan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2015 semuanya didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko Sosilo dan Nirdukita Ratnawati (Seminar Cendikiawan, 2015) dengan judul "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan PDB: Analisis Sektoral Tahun 2006-2013*". Penelitiannya menggunakan panel data menyimpulkan bahwa variable pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap PDB sektoral.

Selanjutnya penelitian dari Beni Eko Nandar (2010) dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Bank Riau Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau*". Penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan bank riau syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya penelitian dari Safaah Restuning Hayati (2014) dengan judul "*Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*". Penelitiannya dengan metode *Ordinary Last Square* (OLS) menyimpulkan bahwa total asset perbankan syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB, sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDB.

Selanjutnya adalah penelitian dari Ali Rama (2011) dengan judul *“Analisis Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”*. Penelitiannya menggunakan uji kointegrasi dan VECM menyimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara sektor perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“PENGARUH ASPEK-ASPEK DALAM PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA PADA TAHUN 2010-2015”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian untuk menghindari berbagai keracuan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015 ?
2. Bagaimana pengaruh total aset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015 ?
3. Bagaimana pengaruh besarnya pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh total aset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh besarnya pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa tahun 2010-2015, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Akademisi.

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran atau studi banding bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan hasilnya diharapkan mampu memberikan

wawasan dan informasi yang dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menghadapi permasalahan ekonomi, sehingga diharapkan bisa membuat kebijakan dengan lebih tepat.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang keterkaitan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat dapat ambil bagian dalam meningkatkan perekonomian.